

Pengaruh penanaman modal dalam negeri, upah minimum dan belanja modal terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi

Rizki Kenraraswati*; M. Syurya Hidayat; Yohanes Vyn Amzar

Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi

**E-mail korespondensi: kenraraswatirizki@gmail.com*

Abstract

The study aims to analyze the effect of domestic investment (PMDN), minimum wage (UMP) and capital expenditure (BM) on employment absorption in Jambi Province. The data used is time series data of Jambi Province during the period 2000-2016. Data were analyzed descriptively as well as multiple regression models. The results of the study found that: 1) the average growth of employment is 3.11 percent per year, domestic investment is 11.67 percent per year, UMP is 16.44 percent per year and capital expenditure is 20.00 percent per year; 2) Simultaneously PMDN, UMP and BM have a significant effect on employment in Jambi Province. Partially the BM variable does not have a significant effect while the PMDN and UMP variables have a significant effect on employment in Jambi Province.

Keywords: *Labor, Domestic investment, Provincial minimum wages, Capital expenditure.*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), upah minimum (UMP) dan belanja modal (BM) terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi. Data yang digunakan adalah data runtun waktu (time series) Provinsi Jambi selama periode Tahun 2000-2016. Data dianalisis secara deskriptif serta model regresi berganda. Hasil penelitian menemukan bahwa: 1) rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerja sebesar 3,11 persen pertahun, PMDN sebesar 11,67 persen pertahun, UMP sebesar 16,44 persen pertahun dan belanja modal sebesar 20,00 persen pertahun; 2) secara simultan PMDN, UMP dan BM berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Secara parsial variabel BM tidak berpengaruh signifikan sedangkan variable PMDN dan UMP berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Kata kunci: Tenaga kerja, Penanaman modal dalam negeri, Upah minimum provinsi, Belanja modal.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi disuatu daerah pada hakikatnya ialah suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mewujudkan suatu keadaan yang lebih baik dan berkesinambungan. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi ialah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan terciptanya lapangan pekerjaan sebagai dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tingkat pengangguran di Provinsi Jambi cukup tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja. Selama periode Tahun 2013 – 2016, rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi adalah sebesar 4,55 persen atau 72.014 pengangguran dari total 1.584.150 angkatan kerja.

Tabel 1. Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2013-2016

Tahun	Angkatan Kerja (jiwa)			Tingkat pengangguran terbuka (%)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	
2013	1.382.471	70.361	1.452.832	4,84
2014	1.491.038	79.784	1.570.822	5,08
2015	1.550.403	70.349	1.620.752	4,34
2016	1.624.522	67.671	1.692.193	4,00
Rata-rata	1.512.109	72.041	1.584.150	4,55

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka Tahun 2017

Teori Keynes menyatakan bahwa cara mengurangi pengangguran adalah dengan cara memperbanyak investasi. Hal ini dikarenakan, semakin banyak investor yang berinvestasi maka akan menambah faktor-faktor produksi seperti mesin. penambahan teknologi berupa mesin ini akan membutuhkan operator untuk mengoperasikan mesin tersebut sehingga secara langsung maupun tidak langsung akan menyerap tenaga kerja.

Selain investasi, usaha meningkatkan penyerapan tenaga kerja juga tidak terlepas dari salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat upah. Kebijakan upah minimum pada dasarnya dapat dilihat dalam dua sisi. Pertama, upah minimum merupakan alat proteksi bagi pekerja untuk mempertahankan agar nilai upah yang diterima tidak menurun untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, sebagai alat proteksi bagi pengusaha untuk mempertahankan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat upah maka akan semakin banyak tenaga kerja yang terserap.

Selanjutnya, kebijakan pengeluaran pemerintah secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah akan mendorong pembangunan ekonomi karena akan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pembangunan ekonomi tersebut. Pengeluaran pemerintah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja modal adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja modal ini akan menambah aset atau kekayaan daerah tersebut dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin untuk pemeliharaan aset tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut terlihat bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap seiring dengan meningkatnya penanaman modal dalam negeri, upah minimum dan belanja modal di Provinsi Jambi. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penanaman modal dalam negeri, upah minimum dan belanja modal terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data runtun waktu periode Tahun 2000-2016, mencakup daya serap tenaga kerja, penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi dan belanja modal Provinsi Jambi. Data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi.

Data dianalisis menggunakan model regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)*. Adapun model yang digunakan sebagai berikut.

$$DTK_t = \beta_0 + \beta_1 PMDN_{1t} + \beta_2 UMP_{2t} + \beta_3 BM_{3t} + \varepsilon_t$$

- DTK = daya serap tenaga kerja
- PMDN = penanaman modal dalam negeri
- UMP = upah minimum provinsi
- BM = belanja modal
- β_0 = intersep
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = koefisien elastisitas
- t = time series (periode waktu penelitian 2000-2016)
- ε = *error term*

Untuk memberikan batasan yang tegas pada variabel yang diteliti, definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian diberikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Definisi operasional variabel

Variabel	Definisi
Daya serap tenaga kerja	Jumlah angkatan kerja yang bekerja pada kegiatan perekonomian diukur dalam satuan jiwa
Penanaman modal dalam negeri	Realisasi investasi dalam negeri yang dilakukan oleh investor dalam negeri di Provinsi Jambi yang di ukur dalam satuan rupiah pertahun
Upah minimum provinsi	Diukur berdasarkan upah minimum Provinsi Jambi dalam satuan rupiah perbulan
Belanja modal	Realisasi belanja pemerintah untuk menambah aset tetap di Provinsi Jambi diukur dalam satuan rupiah pertahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan PMDN, UMP, BM dan daya serap tenaga kerja Di Provinsi Jambi

Perkembangan penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi, belanja modal dan daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi diberikan pada Tabel 3. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa perkembangan tenaga kerja di Provinsi Jambi setiap tahunnya mengalami kenaikan yang berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 3,11 %.

Kenaikan jumlah tenaga kerja di Provinsi Jambi yang menjadi bonus demografi ini sebenarnya dapat mendongkrak perekonomian secara cepat apabila dapat dikelola dengan tepat. Kenaikan tenaga kerja (penduduk yang bekerja) ini juga dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan sektor-sektor perekonomian Provinsi Jambi dalam menyerap tenaga kerja.

Penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jambi juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Rata-rata perkembangan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jambi sebesar 11,91%. Perkembangan penanaman modal dalam negeri tertinggi tercatat pada tahun 2011 yaitu sebesar 50%.

Menurut Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia tahun 2011, peningkatan perkembangan penanaman modal dalam negeri di tahun 2011 ini lebih mengarah pada investasi baru dibandingkan dengan peremajaan investasi yang telah ada dan apabila dilihat berdasarkan jenisnya, peningkatan investasi pada tahun ini lebih didorong oleh investasi nonbangunan sedangkan investasi bangunan sedikit melambat. Meningkatnya investasi tersebut juga merupakan respons dunia usaha terhadap tngginya utilisasi

kapasitas seiring dengan kuatnya permintaan domestik maupun ekspor. Selain itu, peningkatan investasi tahun ini dipengaruhi oleh penguatan nilai tukar rupiah yang mendorong peningkatan impor barang modal.

Tabel 3. Perkembangan PMDN, UMP, BM dan daya serap tenaga kerja Provinsi Jambi

Tahun	Tenaga kerja		PMDN		UMP		Belanja modal	
	Jumlah (Jiwa)	Pert. %	Jumlah (juta Rupiah)	Pert. %	Jumlah (Rupiah)	Pert. %	Jumlah (juta Rupiah)	Pert. %
2000	1.004.844	-	7.065.381	-	173.000	-	91.494.880	-
2001	1.013.666	0,88	7.498.556	6,13	245.000	41,62	54.908.080	-39,99
2002	1.094.331	7,96	8.213.748	9,54	304.000	24,08	96.855.843	76,40
2003	1.101.833	0,69	8.383.113	2,06	390.000	28,29	140.015.887	44,56
2004	1.137.460	3,23	9.090.813	8,44	425.000	8,97	129.203.217	-7,72
2005	1.113.150	-2,14	8.468.662	-6,84	485.000	14,12	205.812.344	59,29
2006	1.103.386	-0,88	9.144.985	7,99	563.000	16,08	333.832.011	62,20
2007	1.146.851	3,94	9.193.509	0,53	658.000	16,87	422.441.973	26,54
2008	1.224.483	6,77	8.838.272	-3,86	724.000	10,03	560.254.716	32,62
2009	1.260.592	2,95	8.048.826	-8,93	800.000	10,50	483.926.718	-13,62
2010	1.360.022	7,89	9.611.608	19,42	900.000	12,50	465.860.321	-3,73
2011	1.434.998	5,51	14.433.096	50,16	1.028.000	14,22	518.750.583	11,35
2012	1.423.624	-0,79	19.933.676	38,11	1.142.500	11,14	682.819.742	31,63
2013	1.382.471	-2,89	25.170.267	26,27	1.300.000	13,79	937.986.070	37,37
2014	1.491.038	7,85	28.418.185	12,90	1.502.230	15,56	874.874.160	-6,73
2015	1.550.403	3,98	31.996.709	12,59	1.710.000	13,83	791.487.340	-9,53
2016	1.624.522	4,78	35.881.109	12,14	1.906.650	11,50	945.539.006	19,46
Rata-rata		3,11		11,67		16,44		20,00

Sumber : Provinsi Jambi Dalam Angka berbagai edisi

Perkembangan penanaman modal dalam negeri terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu menurun sebesar 9%. Penurunan ini disebabkan pada tahun sebelumnya terjadi krisis ekonomi global yang diawali dengan terjadinya krisis ekonomi di negara Amerika Serikat. Terjadinya krisis ekonomi global ini berdampak pada perekonomian Indonesia yang masih sangat bergantung pada aliran dana dari investor.

Investasi yang dilakukan oleh para investor ini akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan. Namun karena terjadi krisis ekonomi global maka investor-investor ini akan menarik dananya kembali dan mengakibatkan jatuhnya mata uang Indonesia.

Penurunan tingkat perkembangan penanaman modal dalam negeri juga terjadi pada tahun 2005 sebesar 7%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2005 terjadi kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi bahan utama input produksi dalam sektor sekunder ini, dan berdasarkan tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank pada tahun yang sama, tingkat suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman meningkat, rata-rata tingkat suku bunga simpanan pada semua jenis bank sebesar 10,87% pertahun dan untuk suku bunga pinjaman sebesar 15,59 % pertahun.

Perkembangan upah minimum Provinsi Jambi mengalami kenaikan dengan rata-rata 16,4% pertahun. Pada tahun 2001 upah minimum provinsi meningkat sebesar 41,6 %, dan merupakan tingkat perkembangan tertinggi. Kenaikan terendah terjadi pada Tahun 2004 yaitu sebesar 9%

Peningkatan upah minimum provinsi ini akan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif adalah terpenuhinya standar kebutuhan hidup masyarakat sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya daya beli masyarakat akan meningkatkan permintaan akan barang dan jasa. Meningkatnya permintaan atas barang dan jasa ini akan mendorong perusahaan untuk memperbanyak produksi dan menyerap tenaga kerja baru. Dampak negatif kenaikan upah minimum

provinsi diantaranya akan meningkatkan harga barang dan pemutusan hubungan kerja. Kenaikan harga barang ini dipicu oleh bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan seperti untuk produksi dan untuk upah tenaga kerja. Namun tidak jarang perusahaan tersebut akan melakukan pemutusan hubungan kerja untuk mengurangi tenaga kerja yang digunakan sehingga biaya yang dikeluarkan untuk upah tenaga kerja dapat berkurang.

Kenaikan upah minimum provinsi yang terlalu tinggi akan menyebabkan menurunnya tingkat investasi. Hal ini dikarenakan sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi di suatu daerah, investor akan melihat besaran upah minimum yang ditetapkan sebagai salah satu pertimbangan untuk biaya operasional yang akan dikeluarkan. Untuk Provinsi Jambi, biaya tenaga kerja masuk kedalam urutan ke-13 dalam faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di Povinsi Jambi. Hal ini berarti bahwa biaya tenaga kerja yang nantinya akan dikeluarkan oleh perusahaan tidak memberatkan perusahaan-perusahaan tersebut sehingga ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penetapan upah minimum Provinsi Jambi meningkat setiap tahunnya.

Perkembangan belanja modal Provinsi Jambi pada periode penelitian mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 20%. Pada periode tahun 2000 sampai 2001 belanja modal di Provinsi Jambi menurun drastis sebesar 40%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2001 proporsi anggaran belanja pemerintah lebih banyak dikeluarkan untuk belanja tidak langsung atau dengan kata lain anggaran belanja pemerintah Provinsi Jambi tahun 2001 lebih mengarah untuk belanja yang bersifat konsumtif. Namun pada tahun 2002 dan 2003 belanja modal pemerintah Provinsi Jambi kembali meningkat sebesar 76,4% dan sebesar 44,6%.

Tahun 2002 ini menjadi tahun dimana terjadi peningkatan perkembangan belanja modal tertinggi. Alokasi dana belanja modal yang besar diarahkan pada belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya diharapkan dapat menambah kegiatan produktif di masyarakat, mendorong produktivitas masyarakat dan selanjutnya mampu memberikan keuntungan serta dapat dijadikan sumber bagi penerimaan daerah.

Pada tahun 2004 belanja modal Provinsi Jambi kembali mengalami penurunan 7,7%. Untuk tahun selanjutnya yaitu tahun 2005-2008 realisasi anggaran belanja modal pemerintah Provinsi Jambi terus meningkat masing-masing sebesar 59,3%, 62,2 %, 26,5 %, dan 32,6 %. Namun pada Tahun 2009 dan 2010 terjadi penurunan sebesar 13,6% dan 3,7% sebagai dampak dari terjadinya krisis ekonomi global pada masa itu. Pada Tahun 2011-2013 belanja modal pemerintah Provinsi Jambi kembali meningkat masing-masing sebesar 11,4 %, 31,6% dan 37,4%. Pada tahun 2014 dan 2015 perkembangan belanja modal menurun sebesar 6,7 % dan 9,5 % sedangkan pada Tahun 2016 meningkat sebesar 19,5 %.

Pengaruh penanaman modal dalam negeri, upah minimum dan belanja modal terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi

Estimasi model pengaruh penanaman modal dalam negeri, upah minimum dan belanja modal terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi secara terperinci diberikan pada Tabel 4.

Tabel 4.Estimasi model daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	957472.6	19328.11	49.53782	0.0000
PMDN	-0.007679	0.003304	-2.324002	0.0370
UMP	0.579848	0.096813	5.989394	0.0000
BM	-0.000150	0.000109	-1.375899	0.1921
R-squared	0.963713			
Adjusted R-squared	0.955339			
S.E. of regression	41137.77			
Sum squared resid	2.20E+10			
Log likelihood	-202.4613			
F-statistic	115.0843			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data diolah (2018)

Uji simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujiannya apabila Prob. F hitung $< \alpha$ berarti seluruh variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikan tertentu. Nilai Prob. F hitung dalam penelitian ini (0.0000) $< \alpha$ (0.01). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi dan belanja modal secara bersama-sama berpengaruh terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa nilai R-squared sebesar 0,963713. Hal ini berarti bahwa, 96% besar kecilnya daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi dapat dijelaskan oleh variabel independen yang terdapat dalam penelitian yaitu penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi dan belanja modal. Sedangkan sisanya sebesar 3,62% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji parsial (uji t)

Berdasarkan uji t, dari tiga variabel yang diajukan, dua variabel berpengaruh signifikan yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan upah minimum provinsi (UMP), sedangkan variabel belanja modal (BM) tidak berpengaruh signifikan.

Nilai koefisien variabel penanaman modal dalam negeri sebesar -0.007679. Angka ini dapat diinterpretasikan, setiap kenaikan 1 juta rupiah penanaman modal dalam negeri akan terjadi penurunan daya serap tenaga kerja sebanyak 0,0076 orang, dengan asumsi upah minimum provinsi dan belanja modal tidak mengalami perubahan atau konstan.

Pengaruh negatif penanaman modal dalam negeri ini menunjukkan bahwa investasi yang terjadi di Provinsi Jambi belum tepat sasaran dalam kerangka meningkatkan kesempatan kerja. Hal yang sama juga terlihat pada belanja modal. Tidak signifikannya pengaruh belanja modal terhadap daya serap tenaga kerja menunjukkan bahwa belum tepatnya alokasi belanja modal di Provinsi Jambi dalam kerangka peningkatan kesempatan kerja.

Sebaliknya nilai koefisien variabel upah minimum provinsi sebesar 0.579848. Ini berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar 100 ribu rupiah akan berdampak pada kenaikan daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi sebesar 58 orang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Rata-rata perkembangan daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi selama periode Tahun 2000 – 2016 adalah sebesar 3,11% pertahun. Perkembangan penanaman modal di Provinsi Jambi sebesar 11,67% pertahun. Perkembangan upah minimum provinsi sebesar 16,44% pertahun dan belanja modal adalah 20,00% pertahun.

Secara simultan, penanaman modal dalam negeri, upah minimum provinsi dan belanja modal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi. Secara parsial penanaman modal dalam negeri berpengaruh negatif dan signifikan, upah minimum provinsi memiliki pengaruh positif dan signifikan dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap daya serap tenaga kerja di Provinsi Jambi periode tahun 2000-2016.

Saran

Pemerintah Provinsi Jambi hendaknya terus meningkatkan pembangunan ekonomi yang dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Provinsi Jambi. Selain itu, meningkatkan kegiatan ekonomi yang bersifat padat karya sehingga akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jambi.

Pada penelitian selanjutnya, disarankan analisis mengenai daya serap tenaga kerja ini dapat dilakukan secara spesifik yaitu menganalisis daya serap tenaga kerja persektor perekonomian. Dengan menganalisis persektor perekonomian maka dapat dirumuskan kebijakan peningkatan penyerapan tenaga kerja yang lebih tepat sasaran kepada sektor.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2016). *Jambi Dalam Angka Edisi 2016*. Jambi : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Ketenagakerjaan Provinsi Jambi Tahun 2000-2016*, diunduh melalui: <https://Jambi.Bps.Go.Id/Statictable/2016/10//26/114/Ketenagakerjaan-Provinsi-Jambi-Tahun-2000-2016.Html>
- Badan Pusat Statistik. (2016). *Upah Minimum Provinsi dan Rata-Rata Nasional Pertahun 1997-2016*, di unduh dari: <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>. diakses: 05Agustus 2018
- Bank Indonesia. (2011). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2011*, diunduh melalui: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporantahunan/perekonomian/Pages/lpi_2011.aspx. diakses : 20 November 2018
- Bank Indonesia. (2017). *Suku Bunga Pinjaman Rupiah*. Diunduh melalui: https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_26.xls. diakses: 20 November 2018
- Bank Indonesia. (2017). *Suku Bunga Simpanan Rupiah*. Diunduh melalui: https://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL1_26.xls. diakses: 20 November 2018
- Br, Arfida. (2003). *Ekonomi Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Gujarati, D.N. (2003). *Ekonomertrika Dasar*. Jakarta: Erlangga
- Haryadi. (2010). Analisis Daya Tarik Investasi Di Provinsi Jambi. *Laporan Penelitian*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis: Universitas Jambi.
- Idris, A. (2016). *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish
- Ilmar, A. (2010). *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*. Jakarta: Predana Media
- Junaidi, J., & Zulfanetti,Z. (2016). Analisis Kondisi dan Proyeksi Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(3), 141-150.

- Mankiw, Gregory, N. (2003). *Pengantar Ekonomi*. Edisi Kedua Jilid Satu. Jakarta: Erlangga
- Rahmadi, S. & Muhammad S.. (2014). Peningkatan Belanja Modal Dan Hubungannya Terhadap Peningkatan Belanja Aset dan PAD Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*. 9(1). 22-40.
- Samuelson, P.A. & William D.N. (2004). Ilmu Ekonomi Makro Edisi Ke-17. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Sumarsono, S. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia Dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu